

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Sekretaris,

dto

SAMSIR TOONA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
Pengungkapan Penting Lainnya	46
Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: 402072.papbr@gmail.com

PEKANBARU – RIAU 28289

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Sekretaris,

dto

SAMSIR TOONA

NIP 19780312 20031003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru Semester I 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.614.560,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.327.933.988,00 atau mencapai 44,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.347.959.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.822.282.559,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp60.513.171,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.745.625.100,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp16.144.288,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp29.772.282.559,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp11.383.560,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.602.345.820,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.590.962.260,00). Surplus

Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.615.819,00 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(6.586.346.441,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp29.958.419.572,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(6.586.346.441,00). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.400.209.428,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp29.772.282.559,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER I TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	12,614,560	-	23,204,071
JUMLAH PENDAPATAN		-	12,614,560	-	23,204,071
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	13,069,467,000	5,656,204,141	43.28	6,368,173,000
Belanja Barang	B.4	1,175,992,000	607,729,847	51.68	531,483,704
Belanja Modal	B.5	102,500,000	65,000,000	63.41	343,877,430
JUMLAH BELANJA		14,347,959,000	6,328,933,988	44.11	7,243,534,134

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMTR I TA 2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50,000,000	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	6,448,560
Persediaan	C.3	10,513,171	1,540,300
Jumlah Aset Lancar		60,513,171	7,988,860
ASET TETAP			
Tanah	C.4	18,399,971,000	18,399,971,000
Peralatan dan Mesin	C.5	3,149,346,028	2,999,456,028
Gedung dan Bangunan	C.6	10,950,485,240	10,950,485,240
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	68,696,200	68,696,200
Aset Tetap Lainnya	C.8	977,900	977,900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(2,823,851,268)	(2,485,416,892)
Jumlah Aset Tetap		29,745,625,100	29,934,169,476
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	8,881,972	8,881,972
Aset Lain-Lain	C.11	303,397,830	303,397,830
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(296,135,514)	(290,037,005)
Jumlah Aset Lainnya		16,144,288	22,242,797
JUMLAH ASET		29,822,282,559	29,964,401,133
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada piha ketiga	C.13	-	3,776,561
Pendapatan diterima dimuka	C.14	-	2,205,000
Uang muka dari KPPN	C.15	50,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50,000,000	5,981,561
JUMLAH KEWAJIBAN		50,000,000	5,981,561
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	29,772,282,559	29,958,419,572
JUMLAH EKUITAS		29,772,282,559	29,958,419,572
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29,822,282,559	29,964,401,133

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMTR I THN 2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11,383,560	23,202,680
JUMLAH PENDAPATAN		11,383,560	23,202,680
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5,660,361,540	6,352,639,781
Beban Persediaan	D.3	34,061,736	21,028,300
Beban Barang dan Jasa	D.4	357,637,729	320,537,512
Beban Pemeliharaan	D.5	185,531,930	155,781,482
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20,220,000	15,426,169
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	344,532,885	317,372,457
JUMLAH BEBAN		6,602,345,820	7,182,785,701
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6,590,962,260)	(7,159,583,021)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	D.8	3,436,000	-
Beban pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		3,436,000	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.10	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	1,477,024	702,991
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	297,205	30,000
Lainnya		1,179,819	672,991
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4,615,819	672,991
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.14	-	-
Surplus/ (defisit) Dari Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6,586,346,441)	(7,158,910,030)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SMTR I THN 2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	29,958,419,572	29,535,445,925
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,586,436,441)	(7,158,910,030)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			
Setoran Surplus BLU	E.4	6,400,209,428	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(186,227,013)	12,601,011,892
EKUITAS AKHIR	E.6	29,772,192,559	34,977,547,787

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru

Dasar Hukum *Entitas dan* *Rencana* *Strategis*

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu dari 359 peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai konsekuensi dari dijadikannya Pekanbaru sebagai ibu kota Kota Pekanbaru karena Pengadilan Agama berada dalam Kota atau Kabupaten yang wilayah hukumnya adalah Kota atau Kabupaten.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015–2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi

Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan

Agama Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

Sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan ini berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 658/PB/2018 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 617/PB/2018 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru

adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c.Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak	50

Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Pengadilan Agama Pekanbaru** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya estimasi belanja langganan daya dan jasa khususnya langganan listrik yang diperkirakan tidak mencukupi sampai dengan Desember 2019 serta adanya penambahan anggaran dari BA-BUN untuk belanja langganan daya dan jasa khusus langganan internet, bantuan sewa rumah dinas untuk hakim serta penambahan laptop hakim dalam hal ini kewenangan dari Eselon I dengan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Langganan Listrik	174,704,000	247,574,000
Langganan Internet	85,200,000	140,500,000
Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	0	12,000,000
Belanja Modal Laptop Hakim	65,000,000	102,500,000
Jumlah Belanja	324,904,000	502,574,000

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar 12.614.560,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dengan rincian sebagai berikut:

Rp12.614.560,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	SMTR I THN 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN	-	3,436,000	-
Pendapatan sewa tana, gedung dan bangunan	-	2,730,000	-
Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	6,448,560	-

Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru periode Semester I Tahun 2019 mengalami penurunan 725.13 persen dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan antara oleh karena pada Tahun 2019 tidak ada anggaran pendapatan, sedangkan tahun 2018 anggaran pendapatan sebesar Rp3.200.000,00. Selain itu, Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan sebagian besar persekot/uang muka gaji telah dilunasi pada Tahun 2018.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	3,436,000	-	0.00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	2,730,000	2,002,000	36.36
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	6,448,560	21,200,680	-69.58
Jumlah	12,614,560	23,202,680	-45.63

Realisasi Belanja
Negara
Rp6.327.933.988,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pekanbaru pada Semester I Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.327.933.988,00 atau 44.10% dari anggaran belanja sebesar Rp14.347.959.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I 2019

Uraian	SEMESTER I 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,655,207,141	6,368,363,554	112.61
Belanja Barang	607,729,847	531,483,704	87.45
Belanja Modal	65,000,000	343,877,430	529.04
Total Belanja Kotor	6,327,936,988	7,243,724,688	114.47
Pengembalian	3,691	190,554	-
Jumlah	6,327,933,297	7,243,534,134	114.47

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja Semester I 2019 mengalami penurunan sebesar 12.64% dibandingkan

realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja pegawai yang menurun diakibatkan oleh adanya mutasi beberapa Hakim ke Satker lain yang berdampak pada realisasi belanja pegawai;
2. Penambahan anggaran dari BA-BUN untuk belanja barang dan belanja modal yang terjadi pada akhir Juni 2019 sehingga belum dapat dimanfaatkan,
3. Belanja modal TA. 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan belanja modal pada TA. 2019 sehingga berdampak menurunnya realisasi belanja modal TA. 2019 dibandingkan dengan TA. 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,655,204,141	6,368,173,000	(11.20)
Belanja Barang	607,729,847	531,483,704	14.35
Belanja Modal	65,000,000	343,877,430	(81.10)
Jumlah	6,327,933,988	7,243,534,134	(12.64)

Belanja Pegawai
Rp5.655.204.141,
00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.655.204.141,00 dan Rp6.368.17300. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS. Realisasi belanja Semester I 2019 mengalami penurunan sebesar 11.20 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi hakim ke satker lain.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,758,906,260	1,828,362,400	(3.80)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,334	20,563	18.34
Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	140,120,164	139,945,700	0.12
Belanja Tunj. Anak PNS	38,266,101	39,284,438	(2.59)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20,160,000	20,160,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,815,730,000	3,302,535,000	(14.74)
Belanja Tunj. PPh PNS	419,908,053	480,341,673	(12.58)
Belanja Tunj. Beras PNS	74,302,920	80,313,780	(7.48)
Belanja Uang Makan PNS	206,200,000	260,450,000	(20.83)
Belanja Tunjangan Umum PNS	10,140,000	13,100,000	(22.60)
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	171,450,000	203,850,000	(15.89)
Jumlah Belanja Kotor	5,655,207,832	6,368,363,554	(11.20)
Pengembalian Belanja Pegawai	3,691	190,554	(98.06)
Jumlah Belanja	5,655,204,141	6,368,173,000	(11.20)

Belanja Barang

Rp607.729.847,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I 2019 dan 20198 adalah masing-masing sebesar Rp607.729.847,00 dan Rp531.483.704,00. Realisasi Belanja Barang Semester I 2019 mengalami kenaikan 14.35% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang khususnya belanja langganan daya dan jasa khususnya listrik. Dengan bertambahnya jumlah peralatan dan mesin maka pemakaian arus listrik juga meningkat dan tagihan listrikpun makin meningkat. Selain itu juga, belanja persediaan juga semakin meningkat seiring dengan banyaknya keperluan ATK yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Demikian juga dengan perjalanan dinas, kegiatan terkait dengan pembangunan zona integritas tahun 2019 ini begitu intens sehingga belanja perjalanan dinaspun meningkat.

Perbandingan Belanja Barang Semester I 2019 dan
2018

URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja perjalanan dinas	20,220,000	15,426,169	31.08
Belanja Keperluan Perkantoran	187,031,897	202,033,726	(7.43)
Belanja Pengiriman Surat Dinas	996,000	1,657,000	(39.89)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,450,000	18,450,000	-
Belanja Barang Operasional Lainnya	37,146,400	24,779,193	49.91
Belanja Barang Persediaan	53,409,170	27,162,100	96.63
Belanja Bahan	489,250	0	100.00
Belanja Langganan Listrik	114,678,270	93,447,568	22.72
Belanja Langganan Telepon	1,331,312	1,510,266	(11.85)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90,721,541	100,326,776	(9.57)
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	83,256,007	46,690,906	78.31
Jumlah Belanja	607,729,847	531,483,704	14.35

Belanja Modal
Rp65.000.000,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp65.000.000,00 dan Rp343.877.430,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester I 2019 mengalami penurunan sebesar 266.27% dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh berkurangnya anggaran belanja modal TA. 2019 dibandingkan dengan 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Laptop	65,000,000	195,000,000	(66.67)
Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	54,193,430	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	94,684,000	(100)
Jumlah Belanja	65,000,000	343,877,430	(266.67)

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp65.000.000,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I 2019 adalah sebesar Rp65.000.00000, mengalami penurunan sebesar 240,58 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp249.193.430,00. Hal ini disebabkan oleh belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2019 terbatas hanya untuk pengadaan laptop hakim saja yang jumlahnya 8 unit dengan anggaran senilai Rp102.500.000,00 dibanding TA 2018 anggaran belanja modal peralatan dan mesin mencapai Rp292.019.000,.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	65,000,000	195,000,000	-66.67
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	54,193,430	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	65,000,000	249,193,430	-73.92
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	65,000,000	249,193,430	-240.58

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp94.684.000,00. Realisasi Belanja Modal Semester I 2019 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan pada TA. 2019 tidak ada anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester I 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Gedung Pos Jaga Satpam	-	94.684.000	-100,00
Jumlah Belanja	-	94.684.000	-100,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMTR I 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I 2019 dan 2018 masing-masing Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp50.000.000,
00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I 2019 dan 2018

Keterangan	SMTR I 2019	TH. 2018
Uang Tunai	41.532.600	-
Kuitansi Yang Belum di-SP2D-kan	8.467.400	-
Jumlah	50.000.000	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0. Selain itu juga Pengadilan Agama Pekanbaru tidak memiliki rekening bendahara penerimaan.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0.

Piutang
PNBP Rp0

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Bagian Lancar
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA
Rp0
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyisihan
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0.

Belanja
C.8 Belanja Dibayar di Muka

Dibayar di
Muka Rp0
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp6.448.560,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Semester I 2019 dan 2019

Jenis	SMTR I 2019	TH 2018
Pembayaran persekot/uang muka gaji	-	6.448.560
Jumlah	-	6.448.560

Pendapatan
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih
Harus
Diterima Rp0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan
Rp10.513.171,0
0

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp10.513.171,00 dan Rp1.540.300,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I 2019 dan 2018

Jenis	SMTR I 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	9.568.570	1.121.300
Bahan Untuk Pemeliharaan	944.601	419.000
Jumlah	10.513.171	1.540.300

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp18.339.971.00
0,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Pekanbaru per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp18.339.971.000,00 dan Rp18.339.971.000,00.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai Perolehan
1	100 m2	Jl. Kesadaran	54,800,000
2	844 m2	Jl. Kesadaran	480,000,000
3	9.542 m2	Jl. Nurul Amal Kel. Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru	1,196,742,380
4	274 m2	Jl. Kembang Sari Kel. Cinta Raja Kec. Sail, Pekanbaru	341,130,000
5	400 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	80,000,000
6	1.250 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	316,750,000
7	3.892 m2	Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Pekanbaru	915,780,000
8	400 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	101,410,000
9	1.250 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	316,750,000
10	1.000 m2	Jl. Bunga Kertas No. 21 Kel. Kedung Sari, Pekanbaru	1,217,650,000
11	1.181 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	301,089,200
12	1.188 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	301,089,200
Jumlah			5,623,190,780

Peralatan dan
Mesin
Rp3.149.346.028,
00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah Rp3.149.346.028,00 dan Rp2.999.456.028,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.999.456.028
Mutasi tambah:	
Pembelian	65.000.000
Hibah Barang	84.890.000
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2016	3.149.346.028
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	-2.239.053.469
Nilai Buku per 30 Juni 2019	910.292.559

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Laptop senilai Rp65.000.000,00; dan
- b. Hibah langsung berupa PC. Dan Printer serta Scaner senilai Rp84.890.000,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp10.950.485.240,00

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah Rp10.950.485.240,00 dan Rp10.950.485.240,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	10.950.485.240
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	10.950.485.240
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	(566.994.212)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	10.383.491.028

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp68.696.200,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.696.200,00 dan Rp68.696.200,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	68.696.200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	68.696.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 3130 Juni 2019	(17.803.586)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	50.892.614

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp90.000.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah Rp90.000.000 dan Rp90.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	977.900
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2019	977.900
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	977.900

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Akumulasi
Penyusutan

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan

Aset Tetap 2018 adalah masing-masing Rp(2.823.851.268,00) dan *Rp(2.823.851.268,00)* Rp(2.485.416.892,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.149.346.028	2.239.053.469	910.292.559
2	Gedung dan Bangunan	10.950.485.240	566.994.212	10.383.491.028
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.696.200	17.803.583	50.892.617
4	Aset Tetap Lainnya	977.900	0	977.900
Akumulasi Penyusutan		14.169.505.368	2.823.851.264	11.345.654.104

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp8.881.972,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp8.881.972,00 dan Rp8.881.972,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Pekanbaru berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.881.972
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	8.881.972
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2019	(6.424.562)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	2.457.410

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud per 30 Juni 2019

Uraian	Nilai Perolehan
Sofwere	8.881.972
Jumlah	8.881.972

Aset Lain-
Lain
Rp303.397.830,
00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah Rp303.397.830,00 dan Rp303.397.830,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	303.397.830
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2019	303.397.830
Akumulasi Penyusutan per 30 juni 2019	(289.710.952)
Nilai Buku per 30 juni 2019	13.686.878

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(296.135.514
,00)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(296.135.514,00) dan Rp(290.037.005,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	8,881,972	6,424,562	2,457,410
Jumlah	8,881,972	6,424,562	2,457,410
Aset Lain-lain	303,397,830	289,710,952	13,686,878
Jumlah	312,279,802	296,135,514	16,144,288

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN
Rp50.000.000,
00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 330 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.205.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2018 tersebut bersumber sewa ruangan Pengadilan

Agama Pekanbaru oleh Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp00

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp3.776.561,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Semester I
2019 dan 2018

Uraian	SMTR I 2019	TH 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	1.291.161
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	2.485.400
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	3.776.561

Ekuitas
Rp29.772.282.559,
00

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.772.282.559,00 dan Rp29.958.419.572,. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP

Rp11.383.560,00

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp11.383.560,00 dan Rp23.202.680,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	SMTR I 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	4.935.000	2.002.000	147
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	6.448.560	25.360.960	(75)
Pengembalian pendapatan dari penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	0	4.160.280	(100)

Beban Pegawai

Rp5.660.361.540,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.660.361.540,00 dan Rp6.352.639.781,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara maupun PNS.

Rincian Beban Pegawai Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	SMTR I 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.763.526.020	1.845.200.100	-4
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.620	20.666	-0
Beban Tunj. Suami/ Isteri PNS	140.626.000	141.629.490	-1
Beban Tunj. Anak PNS	38.468.435	39.468.072	-3
Beban Tunj. Struktural PNS	20.160.000	20.160.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.815.730.000	3.295.295.000	-15
Beban Tunj. PPh PNS	419.737.545	480.341.673	-13
Beban Tunj. Beras PNS	74.302.920	80.313.780	-7
Beban Tunj. Uang Makan PNS	206.200.000	233.261.000	-12
Beban Tunj. Umum PNS	10.140.000	13.100.000	-23
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	171.450.000	203.850.000	-16
Jumlah	5.660.361.540	6.352.639.781	-11

Beban Persediaan

D.3 Beban Persediaan

Rp34.061.736,00 Jumlah Beban Persediaan pada Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp34.061.736,00 dan Rp21.028.300,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester I 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I 2019 dan 2018

Beban Persediaan Konsumsi	34.061.736	21.028.300	62
Jumlah	34.061.736	21.028.300	62

*Beban Barang
dan Jasa*

Rp357.637.729,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp357.637.729,00 dan Rp320.537.512,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan peralatan dan mesin baik yang diperoleh dari anggaran belanja modal maupun hibah. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	184.546.497	195.120.226	(5,42)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	996.000	1.657.000	(39,89)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.450.000	18.450.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	37.146.400	24.779.193	49,91
Beban Bahan	489.250	0	100,00
Beban Langganan Listrik	114.678.270	79.334.770	44,55
Beban Langganan Telepon	1.331.312	1.196.323	11,28
Jumlah	357.637.729	320.537.512	11,57

Beban
Pemeliharaan
Rp185.531.930,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp185.531.930,00 dan Rp155.781.482,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pemeliharaan peralatan dan mesin yang semakin bertambah.. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester I 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.721.541	100.326.776	(9,57)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.256.007	46.690.906	78,31
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11.554.382	8.763.800	31,84
Jumlah	185.531.930	155.781.482	19,10

Beban Perjalanan Dinas
Rp20.220.000,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semwester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.220.000,00 dan Rp15.426.169,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi/sosialisasi yang meningkat terkait dengan Pembangunan Zona Integritas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	SMTR I 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	20.070.000	14.076.169	42,58
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	1.350.000	-88,89
Jumlah	20.220.000	15.426.169	31,08

Beban Barang untuk Diserahkan kepada

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I

Masyarakat
Rp0

2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp344.532.885,0
0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp344.532.885,00 dan Rp317.372.457,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun Semester I 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester I 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SMTR I 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	207.717.909	191.112.299	0,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129.857.764	128.787.102	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	858.703	858.703	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.484.156	-	7,22
Jumlah Penyusutan	343.918.532	320.758.104	7,22
Beban Amortisasi Software	614.353	614.353	-
Jumlah Amortisasi	614.353	614.353	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	344.532.885	321.372.457	7,21

Beban Penyisihan
Piutang Tak

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk

Tertagih Rp0 mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.436.000,00*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	3.436.000	0	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	0	1.391	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	1.477.024	701.600	110,52
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	297.205	30.000	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4.615.819	672.991	585,87

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp29.958.419.572,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.958.419.572,00 dan Rp29.535.445.925,00.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp(6.586.346.441,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2019 adalah sebesar Rp(6.586.346.441,00) dan Rp(7.158.910.030,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset Tetap

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi

Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0.

Koreksi Lain-Lain **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp6.400.209.428,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.400.209.428,00 dan Rp7.220.330.063,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima ke Entitas Lain	6.327.933.988
Diterima dari Entitas Lain	(12.614.560)
Pengesahan Hibah Langsung	84.890.000
Jumlah	6.400.209.428

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp6.327.933.988,00 sedangkan DKEL sebesar Rp(12.614.560,00).

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang

maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp84.890.000,00 yang diterima periode sampai dengan 30 Juni 2019.

Rincian Penerimaan Hibah Langsung periode sampai dengan 30 Juni 2019 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp29.772.282.559,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.772.282.559,00 dan Rp29.596.865.958,00

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan Juni 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru mendapat tambahan anggaran melalui Revisi BA-BUN yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran 2019 khusus belanja barang dan belanja modal. Revisi BA-BUN tersebut meliputi belanja langganan internet, belanja bantuan sewa rumah dinas Hakim serta belanja modal pengadaan laptop hakim. Sementara itu belanja langganan listrik juga mengalami penambahan melalui revisi DJA oleh Eselon I.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat biaya yang dititipkan oleh pihak ketiga yang ditampung pada rekening pemerintah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keadaan Keuangan				
	Saldo Awal 01 Januari 2019	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 30 Juni 2019	Kas di Bank
Biaya Perkara	164,919,700	107,421,500	103,492,500	168,848,700	165,587,100
Biaya Eksekusi	84,046,900	0	0	84,046,900	83,324,800
Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	248,966,600.00	107,421,500.00	103,492,500.00	252,895,600.00	248,911,900.00

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2019	Per 30-06-2019	Per 30-06-2019	Per 30-06-2019
A	Tanah						
1	Tanah	-	18,399,971,000	-	-	-	18,399,971,000
	Jumlah		18,399,971,000	-	-	-	18,399,971,000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	423,515,003	423,515,003	-	423,515,003	-
2	Alat Bengkel Bermesin	10	28,390,000	-	1,419,500	1,419,500	26,970,500
3	Alat Ukur	5	18,730,000	5,004,000	1,616,000	6,620,000	12,110,000
4	Alat Kantor	5	210,677,588	132,301,028	14,809,780	147,110,808	63,566,780
5	Alat Rumah Tangga	5	1,031,335,630	708,894,024	71,340,613	780,234,637	251,100,993
6	Alat Studio	5	24,262,000	12,388,600	1,696,200	14,084,800	10,177,200
7	Alat Komunikasi	5	42,677,250	27,223,450	2,526,900	29,750,350	12,926,900
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	10,843,050	2,530,045	361,435	2,891,480	7,951,570
9	Komputer Unit	4	813,771,687	445,566,689	72,406,817	517,973,506	295,798,181
10	Peralatan Komputer	4	257,655,320	172,721,721	27,783,164	200,504,885	57,150,435
11	Alat Kerja Penerbangan	3	305,085,000	107,503,000	15,254,250	122,757,250	182,327,750
	Jumlah		3,166,942,528	2,037,647,560	209,214,659	2,246,862,219	920,080,309
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6,924,778,240	232,793,363	72,752,709	305,546,072	6,619,232,168
2	Tugu/ Tanda Batas	50	1,651,396,000	82,569,800	16,513,960	99,083,760	1,552,312,240
3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2,374,311,000	121,773,285	40,591,095	162,364,380	2,211,946,620
	Jumlah		10,950,485,240	437,136,448	129,857,764	566,994,212	10,383,491,028
D	Jaringan dan Irigasi						
1	Jaringan Listrik	40	54,738,200	16,421,459	684,228	17,105,687	37,632,513
2	Bangunan Air Irigasi	50	13,958,000	523,425	174,475	697,900	13,260,100
	Jumlah		68,696,200	16,944,884	858,703	17,803,587	50,892,613
E	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Bantu	7	420,000	420,000	-	-	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	28,000,000	28,000,000	-	-	-
3	Alat Kantor	5	59,126,000	59,126,000	-	-	-
4	Alat Rumah Tangga	5	146,423,730	128,159,445	5,365,406	133,524,851	12,898,879
5	Alat Studio	5	10,200,000	10,200,000	-	10,200,000	-
6	Alat Komunikasi	5	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	-
7	Unit Alat Laboratorium	8	190,000	190,000	-	190,000	-
8	Komputer Unit	4	46,730,500	46,730,500	-	46,730,500	-
9	Peralatan Komputer	4	10,372,600	10,253,850	118,750	10,372,600	-
	Jumlah		303,312,830	284,929,795	5,484,156	202,867,951	12,898,879
Total			32,889,407,798	2,776,658,687	345,415,282	3,034,527,969	29,767,333,829

* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 30 JUNI 2019

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Pegawai PA Pekanbaru	Barang	DN	Rp 80,390,000	Rp 80,390,000	Rp -	-
2	Bank BRISyariah Cab. Pekanbaru	Barang	DN	Rp 450,000	Rp 4,500,000	Rp -	-
Jumlah				Rp 80,840,000	Rp 84,890,000	Rp -	